BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Mahathir, 2011). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan secara sandang, pangan, dan papan, ataupun secara finansial namun kemampuan untuk melakukan pengembangan diri dalam hidup bermasyarakat.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2004) mengklasifikasikan kesejahteraan keluarga menjadi lima, diantaranya adalah Keluarga Prasejahtera, Keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, Keluarga sejahtera III, dan Keluarga sejahtera III Plus. Indikator untuk menilai kesejahteraan sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar Keluarga (*Basic Needs*).

   Enam indikator kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat adalah:

Tabel 2. 1 Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga

No.	Parameter	Keterangan
1	Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.	Kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
2	Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.	Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kehidupan sehari-hari.
3	Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.	Keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

No.	Parameter	Keterangan
4	Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.	Sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).
5	Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.	Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB.
6	Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.	Semua anak 7-15 tahun dari keluarga. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP.

Sumber : BKKBN, 2004

2. Kebutuhan Psikologis *(Psychological Needs)*

Delapan indikator kebutuhan psikologis kesejahteraan masyarakat adalah:

Tabel 2. 2 Indikator Kebutuhan Psikologis

No.	Parameter	Keterangan
1	Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.	Ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dimaksudkan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan.
2	Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging.	Memakan daging sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.
3	Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.	Pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat.
4	Luas lantai rumah paling kurang 8 m^2 untuk setiap penghuni rumah.	Luas lantai rumah minimal 8 m^2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang minimal dari 8 m^2.
5	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.	Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari.
6	Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.	Anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalahsekurang-kurangnya salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus.
7	Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.	Anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf

No.	Parameter	Keterangan
		latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.
8	Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.	Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur atau pada saat usia subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

Sumber : BKKBN, 2004

3. Kebutuhan Pengembangan (*Develomental Needs*)

Lima indikator kebutuhan pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah:

Tabel 2. 3 Indikator Kebutuhan Pengembangan

No.	Parameter	Keterangan
1	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.	Upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama, misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen.
2	Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.	Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,-
3	Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.	Kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.
4	Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.	Keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.
5	Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.	Keluarga memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

Sumber : BKKBN, 2004

4. Aktualisasi Diri/Kebutuhan Sosial *(Self Esteem)*

Dua indikator Aktualisasi diri / kebutuhan sosial kesejahteraan masyarakat adalah:

Tabel 2. 4 Indikator Aktualisasi Diri

No.	Parameter	Keterangan
1	Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.	Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.
2	Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.	Anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).

Sumber : BKKBN, 2004

2.1.1 Definisi Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir di definisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, kearah darat mencangkup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (Beatley et al, 1994 dalam Budianto, 2014). Dalam hal ini ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang beragam, di darat maupun di laut, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia (Budianto, 2014). Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kawasan pesisir adalah wilayah peralihan antar laut dan daratan dan terdapat interaksi termasuk kegiatan manusia didalamnya sehingga wilayah penelitian yaitu Desa Tonyaman termasuk kedalam kawasan pesisir.

2.1.2 Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumberdaya pesisir (Satria, 2004). Masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu pesisir, memiliki kebudayaan yang sama yang identik dengan alam pesisir dan melakukan kegiatannya dalam kelompok tersebut (Tahir, AB. 2012). Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan

pedagang hasil laut, merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan mereka memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan (Neliyanti, 2013). Dengan demikian, masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang mendiami suatu pesisir yang memiliki kegiatan yang identik dengan kegiatan alam dan memanfaatkan sumber daya pesisir.

2.1.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir

Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka. Dari sisi skala usaha perikanan, kelompok masyarakat pesisir miskin diantaranya terdiri dari rumah tangga perikanan yang menangkap ikan tanpa menggunakan perahu, menggunakan perahu tanpa motor dan perahu bermotor tempel. Dengan skala usaha ini, rumah tangga ini hanya mampu menangkap ikan di daerah dekat pantai (Victor, 2001). Dengan demikian dapat diketahui bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pesisir adalah kegiatan usaha perikanan yang bersumber dari laut. Pendeknya rantai usaha perikanan yaitu sebatas penjualan tanpa proses pengolahan mengakibatkan lemahnya perekonomian masyarakat pesisir sehingga nelayan hidup di bawah garis kemiskinan.

2.2 Faktor Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan dari hasil studi yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) diantaranya :

1. Tingkat kesehatan, ditentukan dengan indikator persalinan oleh tenaga medis, tempat pengobatan di puskemas/rumah sakit dan cara pengobatan oleh dokter rumah sakit/dokter praktek.
2. Pendidikan, ditentukan oleh besarnya angka putus sekolah, struktur/tingkat pendidikan masyarakat dan presentase lulusan.
3. Tenaga kerja, ditentukan oleh jenis lapangan usaha yang dikerjakan oleh masyarakat.
4. Mortalitas dan fertilitas, ditentukan oleh jumlah bayi yang lahir meninggal, atau jumlah anak yang meninggal atau yang hidup, ketersediaan fasilitas yang mendukung jumlah kelahiran hidup, presentase wanita usia 15-49 yang pernah kawin dan melahirkan.
5. Perumahan, ditentukan oleh luas lantai rumah, kualitas perumahan

6. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, ditentukan oleh golongan pengeluaran. Rumah tangga yang hidup dibawah Rp 100 ribu perkapita per bulan di kota dan Rp 80 ribu per kapita per bulan di desa. Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Iskandar (2006) membagi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan diantaranya adalah pendapatan, pendidikaan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan asset dan tabungan. Secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2. 5 Indikator faktor internal dari faktor kesejahteraan

No.	Variabel	Indikator
1	Pendapatan	Pendapatan yang didapatkan oleh nelayan dalam kurun waktu satu bulan
2	Pendidikan	Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga
3	Pekerjaan	Pekerjaan yang dikerjakan
4	Anggota Keluarga	Jumlah anggota keluarga inti dan keluarga yang tinggal bersama
5	Umur	Umur kepala keluarga
6	Kepemilikan asset dan tabungan	kepemilikan tabungan berupa uang ataupun asset yang disimpan (lahan, hewan ternak, perhiasan, dll)

Sumber: Iskandar, 2006

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan perbankan dan akses bantuan permodalan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dalam manajemen keluarga adalah perencanaan, pembagian tugas, dan pengontrolan kegiatan.

Secara prinsip setiap pengembangan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut merupakan suatu proses perubahan yang sering menyebabkan perubahan-perubahan pada sumberdaya alam sekitarnya sehingga dalam perencanaan pada suatu sistim ekologi pesisir dan laut perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negative yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri (Bengen, 2000). Mueller dalam Yafiz, M (2009) juga memberikan cakupan model dalam hasil kajian interaksi berbagai faktor yang dapat memperbaiki kesejahteraan nelayan, satu diantaranya adalah Lingkungan usaha perikanan yang terbagi atas internal dan eksternal. **(Tabel 2.6)**

Tabel 2. 6 Faktor internal dan eksternal lingkungan usaha perikanan

Internal	Eksternal
Pemasaran dan distribusi Penelitian dan pengembangan Produksi dan operasi Sumber daya manusia Keuangan	Lingkungan industri (Pemasok, pelanggan dan pesaing) Lingkungan makro (ekonomi, sosial budaya, politik dan hokum, teknologi, dan lingkungan alam)

Sumber: Kariem, 2014

2.3 Pengembagan Ekonomi Lokal (PEL)

Pengembangan Ekonomi Lokal akan membahas definisi dari Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), Tujuan dan sasaran PEL, dan faktor yang mempengaruhi PEL.

2.3.1 Definisi PEL

Local Economic Development atau yang dikenal dengan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah salah satu strategi dalam pengembangan potensi lokal yang ada disuatu daerah. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal menurut Bank Dunia adalah proses dimana pemerintah, sawasta dan masyarakat bekerjasama membentuk kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Definisi lain dari PEL oleh *International Labour Organization (ILO)* adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.

Indikator PEL mengacu kepada indikator yang telah dikembangkan oleh Direktorat Perekonomian Daerah, BAPPENAS (2006). Indikator tersebut dikembangkan berdasarkan konsep heksagonal PEL **(Gambar 2.1)**, yang terdiri dari enam aspek.

Gambar 2. 1 Diagram Heksagonal Pembangunan PEL
Sumber: Panduang Revitalisasi PEL Bappenas, 2006

Segitiga pertama dan kedua yaitu aspek kelompok sasaran dan aspek faktor lokasi merupakan instrumen kunci dalam PEL. Aspek kesinergian dan fokus kebijakan dan aspek pembangunan berkelanjutan merupakan faktor inovatif yang akan memperluas cakupan

PEL. Aspek tata pemerintahan dan proses manajemen merupakan isu penting yang terjadi dalam proses penerapan PEL.

1. Kelompok Sasaran

   Aspek kelompok sasaran merupakan pelaku usaha yang terdiri atas pelaku usaha lokal, investor luar, dan pelaku usaha baru. Keterkaitan dalam kelompok sasaran adalah:

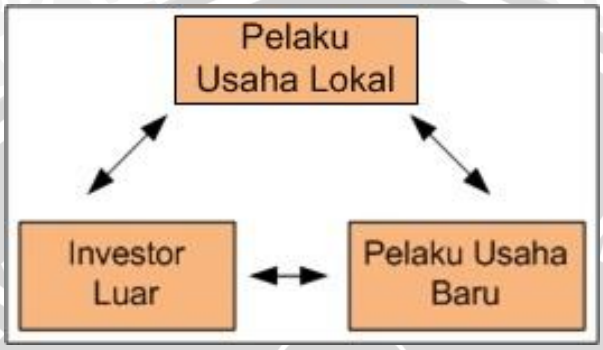

Gambar 2. 2 Keterkaitan pelaku dalam kelompok sasaran
Sumber: Bappenas, 2006

   Keterkaitan antara pelaku usaha lokal, investor luar, dan pelaku usaha lokal saling berkaitan antar satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari arah panah yang berbalik.

2. Faktor Lokasi

   Faktor lokasi merupakan penggambaran daya tarik dari sebuah lokasi bagi penyelenggaraan kegiatan usaha. Faktor lokasi terdiri atas: faktor lokasi terukur, faktor lokasi tidak terukur bagi pelaku usaha, dan faktor lokasi tidak terukur individual. Keterkaitan antar faktor lokasi adalah:

Gambar 2. 3 Keterkaitan faktor lokasi
Sumber: Bappenas, 2006

   Segi tiga biru pada gambar diatas menjelaskan faktor lokasi dapat dilihat dari faktor lokasi yang terukur akan terbentuk bersama faktor lokasi tidak terukur individual dan faktor lokasi tidak terukur pelaku usaha.

3. Kesinergian dan Fokus Kebijakan

   Kesinergian dan fokus kebijakan secara umum meliputi kebijakan terkait. Tiga hal yang saling berkaitan dalam pengembangan ekonomi lokal adalah perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas, serta pembangunan wilayah.

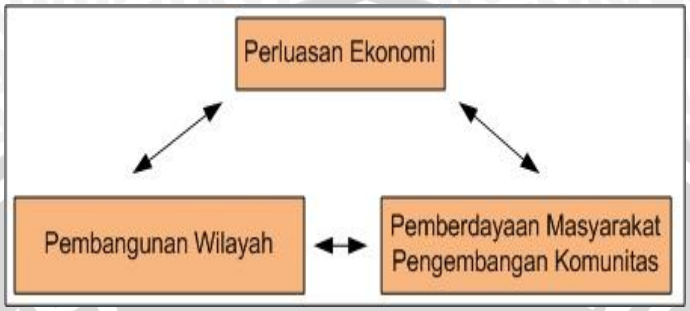

Gambar 2. 4 Keterkaitan kesinergian dan fokus kebijakan
Sumber: Pappenas, 2006

Keterkaitan kesinergian dan fokus kebijakan yaitu antara perluasan ekonomi, pembangunan wilayahm dan pemberdayaan masyarakat pengembangan komunitas memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat pengembangan komunitas akan memperluas ekonomi, dengan adanya perluasan ekonomi makan akan tercipta pembangunan wilayah.

4. Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan berkelanjutan terdiri atas pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial. Aspek ini merupakan bagian dari pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang inovatif.

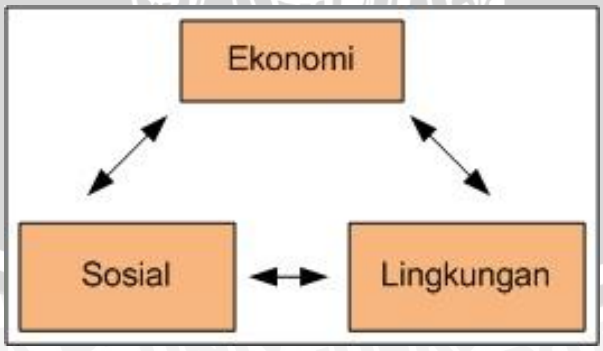

Gambar 2. 5 Keterkaitan pembangunan berkelanjutan
Sumber: Pappenas, 2006

Keterkaitan pada pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Ketiga aspek tersebut memiliki peran penting untuk pembangunan berkelanjutan dengan hubungan timbal balik antar aspek.

5. Tata Pemerintahan

   Tata pemerintahan melihat secara umum pada pelaku usaha diantaranya adalah dari sisi kemitraan dan administrasi pemerintahan. Hal ini memastikan bahwa hubungan pelaku usaha dan masyarakat dibangun atas berlangsungnya pengembangan organisasi pelaku usaha.

Gambar 2. 6 Keterkaitan tata pemerintahan
Sumber: Pappenas, 2006

Kemitraan pemerintah dan dunia usaha merupakan hasil dari reformasi sektor public dan pengembangan organisasi.

6. Proses Manajemen.

   Proses management melihat dari pemetaan wilayah, pengembangan ekonomi lokal, serta pihak yang terlibat yang merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas diagnose dn perencaan, implementassi dan monitoring, serta evaluasi.

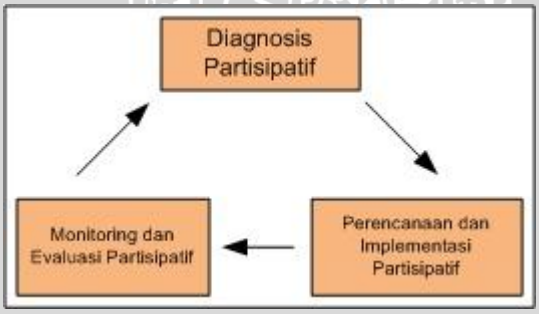

Gambar 2. 7 Keterkaitan Proses Manajemen
Sumber: Pappenas, 2006

2.3.2 Tujuan dan sasaran PEL

Upaya pengembangan ekonomi lokal tidak semata-mata dilihat dari sisi teknis ekonomi, namun justru mendasarkan pada pendekatan kemitraan dan kerjasama diantara pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat (Adi, 2012). Adanya kemitraan dan kerjasama diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat untuk mengembangkan sumberdaya manusia berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat

lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal memiliki tujuan serta sasaran dalam mengembangannya, diantaranya adalah (S. Tavi, 2010):

1. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah secara ekonomis dan berkelanjutan.
2. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
3. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.

Tujuan dan sasaran menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2006) adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat adani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, serta menurunnya tingkat kemiskinan
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi mayarakat lokal.

2.3.3 Faktor Pengungkit

Faktor pengungkit adalah faktor atau komponen yang digunakan untuk meningkatkan hasil (Mario, 2013). Tujuan untuk mengetahui faktor pengungkit adalah untuk menentukan faktor pendorong dalam kegiatan tertentu. Faktor pengungkit dalam konsep PEL diartikan sebagai indikator-indikator dari aspek PEL yang dapat dioptimalkan sehingga mendukung daerah tersebut untuk berkembang.

2.4 Faktor PEL dalam Kesejahteraan Masyarakat

PEL merupakan usaha untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah denga menggunakan secara optimal sumberdaya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat.

Kaitan faktor PEL dengan kesejahteraan sejalan dengan tujuan dan sasaran menurut S. Tavi (2010) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2006) yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, serta menurunnya tingkat kemiskinan.

Arumsani (2014) menyebutkan terdapat dua puluh faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan ekonomi lokal. Faktor PEL yang digunakan adalah untuk melihat kaitan faktor pengungkit dan kesejahteraan yang dapat diterapkan. Pengembangan perekonomian lokal pada kedua puluh faktor tersebut diliha berdasarkan basis perikanan, faktor-faktor tersebut diantaranya:

Tabel 2. 7 Faktor yang mempengaruhi PEL

No.	Faktor PEL	Keterangan
1	Pendapatan masyarakat	Pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dalam kegiatan perikanan.
2	Tingkat pertumbuhan lapangan kerja	Tingkat perumbuhan lapangan kerja dilihat dari apakah jumlah nelayan semakin menurun, terjadi kenaikan dan penurunan tidak menentu, mengalami peningkatan dan cenderung stabil, atau selalu mengalami peningkatan yang cukup pesat.
3	*Basic needs* (tingkat penentuan kebutuhan dasar)	*Basic needs* diartikan sebagai suatu kemapuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur dari kemampuan pemenuhan sandang, pangan dan papan.
4	*Self Esteem* (tingkatan harga diri)	*Self Esteem* diartikan sebagai tingkatan harga diri diukur terkait kegiatan perikanan, dimana dalam acara tersebut nelayan dapat memperoleh berbagai pengetahuan, informasi dan sebagainya.
5	*Ability to chooce*	*Ability to chooce* diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memiliih kebutuhan hidupnya, dalam hal ini dilihat dari kendaraan yang digunakan saat berangkat kerja dari tempat tinggal menuju pantai.
6	*Full Employement*	*Full Employement* yang diartikan sebagai tingkat pemenuhan jumlah angkatan kerja, hal ini dlihat dari jumlah anggota keluarga usia produktif dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja.
7	Keterkaitan antar sektor	Keterkaitan antar sektor melihat seberapa besar pengaruh keberadaan sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor lain.
8	Tingkat pendidikan	Tingkat pendidikan dalam hal ini diartikan sebagai tingkat pengetahuan nelayan terkait kegiatan perikanan.
9	Peran Pemerintah	Peran pemerintah disini diukur dari seberapa besar bantuan pengadaan fasilitas pendukung perikanan yang diberikan kepada masyarakat nelayan.
10	Kontribusi swasta	Kontribusi swasta adalah berkaitan dengan bantuan fasilitas perikanan yang diberikan kepada masyarakat nelayan.
11	Jumlah Nelayan	Lingkup nelayan yaitu nelayan perikanan tangkap dan budidaya.
12	Hasil Produksi	Hasil produksi dalam hal ini adalah hasil produksi perikanan tangkap maupun budidaya.
13	Biaya Operasional	Biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan nelayan saat melakukan kegiatan perikanan
14	Biaya Tetap	Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan dalam

No.	Faktor PEL	Keterangan
		hal pengadaan fasilitas perikanan yang dibutuhkan, baik dari sarana maupun alat tangkap perikanan dan berbagai alat pendukung kegiatan perikanan.
15	Keterjangkauan Harga	Keterjangkauan harga diartikan sebagai kondisi dimana harga mencapai kestabilan, yang mana dalam hal ini ditinjau dari bagaimana harga jual hasil produksi yang didapatkan.
16	Aksesibilitas	Aksesibilitas yang dimaksud adalah kondisi jalan yang berpengaruh tetrhadap kegiatan perikanan.
17	Ketersediaan Pelabuhan Ikan	Ketersediaan pelabuhan ikan untuk menampung hasil tangkapan nelayan.
18	Ketersediaan Unit Pengolahan	Unit pengolahan diartikan sebagai pengolahan hasil baik dalam bentuk industri skala kecil maupun besar serta lokasi industri tersebut.
19	Ketersediaan Unit Pemasaran	Unit pemasaran diartikan sebagai pasar yang khusus penampung hasil penangkapan dari laut.
20	Alat Tangkap Perikanan	Melihat ketersediaan alat tangkap yang digunakan masyarakat dalam melakukan kegatan perikanan.

Sumber: Arumsani, 2014

Tabel 2.7 menjelaskan keterkaitan antara kesejahteraan dengan PEL. Faktor PEL mempetrhatikan kondisi kesejahteraan, hal ini dapat dilihat bahwa faktor PEL diantaranya adalah *basic needs, self esteem, ability to chooce,* dan *full employement* yang merupakan indikator dari kesejahteraan. Sehingga penelitian ini untuk melihat keterkaitan antara kesejahteraan dan PEL digunakan 4 variabel tersebut.

Najiyanti (2016) dalam disertasinya mengenai pendekatan developmental terhadap kesejahteraan sosial menjelaskan implementasi developmental melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan telah meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesinergian yang dibangun oleh PEL tersebut oleh pemerintah, pasar, dan masyarakat.

2.5 Studi Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi pada penelitian terdahulu. Referensi tersebut digunakan untuk mendukung penelitian ini khususnya dalam pemelihan variabel. Penelitian sebelumnya yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu tingkat kesejahteraan dan pengembangan ekonomi lokal. Penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada **tabel 2.8.**

2.6 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diataranya adalah BKKBN (2004) yang berkaitan dengan Tingkat Kesejahteraan. Iskandar (2006), Yaviz (2009), dan Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) untuk faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, serta aspek PEL berdasarkan BAPPENAS (2006). Teori yang digunakan serta alur dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Gambar 2.9**. Selanjutnya alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Gabel 3.2**.

Tabel 2. 8 Literatur yang digunakan

Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Kontribusi
R. Kunto Adi. 2013.	Analisis Pemetaan Status Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Sukoharjo.	Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) bertujuan untuk mengubah paradigma pemangku kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat, terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai instrument untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.	Pengembangan Ekonomi Lokal • Kelompok Sasaran • Faktor Lokasi • Kesinergian dan Fokus Kebijakan • Pembangunan Berkelanjutan • Tata Pemerintahan • Proses management	*Rapid Assesment Techniques For Local Economic Development* (RALED)	Status pemetaan PEL di Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kategori baik. Namun beberapa dari rincian dimensi PEL masih perlu diperhatikan diantaranya kelompok sasaran, fokus dan sinergi kebijakan, tata pemerintahan dan proses manajemen.	• Persamaan, yaitu menggunakan variabel serta parameter yang dipakai dalam penelitian sebelumnya, yaitu Kelompok Sasaran, Faktor Lokasi, Kesinergian dan Fokus Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Tata Pemerintahan, dan Proses management . • Perbedaan, pada penelitian ini menggunakan tidak menggunakan metode RALED namun analisis *Multidimensional Scaling* untuk menentukan penilaian aspek PEL, selain itu juga mengaitkannya dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Eko Sughiarto. 2013	Studi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.	Mengetahui jumlah masyarkat sejahtera di Kampung Gurimbang dan mengetahui tipologi masyarakat nelayan Kampung Gurimbang.	• Kebutuhan dasar • Kebutuhan Sosial Psikologi • Kebutuhan Pengembangan • Kepedulian Sosial	• Analisis Tingkat kesejahteraan • Analisis Tipologi Desa Nelayan	• Dari 33 responden 31 merupakan masyarakat Prasejahtera dan 2 responden Sejahtera 1. • Masyarakat nelayan Kampung Gurimbang termasuk dalam kategori Kampung swakarya	• Persamaan, yaitu menggunakan variabel dan parameter yang sama, yaitu Kebutuhan dasar, Kebutuhan, Sosial Psikologi, Kebutuhan Pengembangan, dan Kepedulian Sosial. Responden yang digunakan juga merupakan masyarakat

Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Hasil	Kontribusi
						yang bekerja di sektor perikanan. • Perbedaan. Perbedaannya adalah pada jumlah sampel. Penelitian ini hanya menggunakan 33 sampel sehingga tidak mewakili secara keseluruhan.
Norul Fajariyah (2014)	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Kawasan Pesisir Pulau Poteran Berbasis Komoditas Perikanan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Mengetahui potensi Pengembangan Ekonomi Lokal Kawasan Pesisir Pulau Poteran Berbasis sub sector perikanan sebagai upaya pengkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Komoditas unggulan di sector perikanan	*Location Quotient* (LQ)	Setiap desa di Pulau Potaran memiliki sektor unggulan komparatif. Komoditas unggulan berupa rumput laut yang digunakan sebagai potensi lokal dengan arah pengembangan pulau Poteran dapat menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal.	• Persamaan, yaitu pada ide penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan berbasis wilayah pesisir. • Perbedaan, penelitian yang dilakukan fokus pada faktor yang mempengaruhi masayarakat pesisir dan masyarakat sebagai subjek dalam menentukan arahan konsep PEL. Selain itu pada penelitian yang dilakukan melibatkan masyarakat secara langsung serta lembaga-lembaga terkait. Sedangkan pada penelitian ini subjek berfokus pada potensi disektor perikanan dengan menggunakan analisis LQ. Pendekatan yang dilakukan berbasis ekonomi berdasarkan nilai LQ yang telah dianalisis untuk dikembangkan melalui pendekatan PEL.

Sumber: Penyusun, 2016

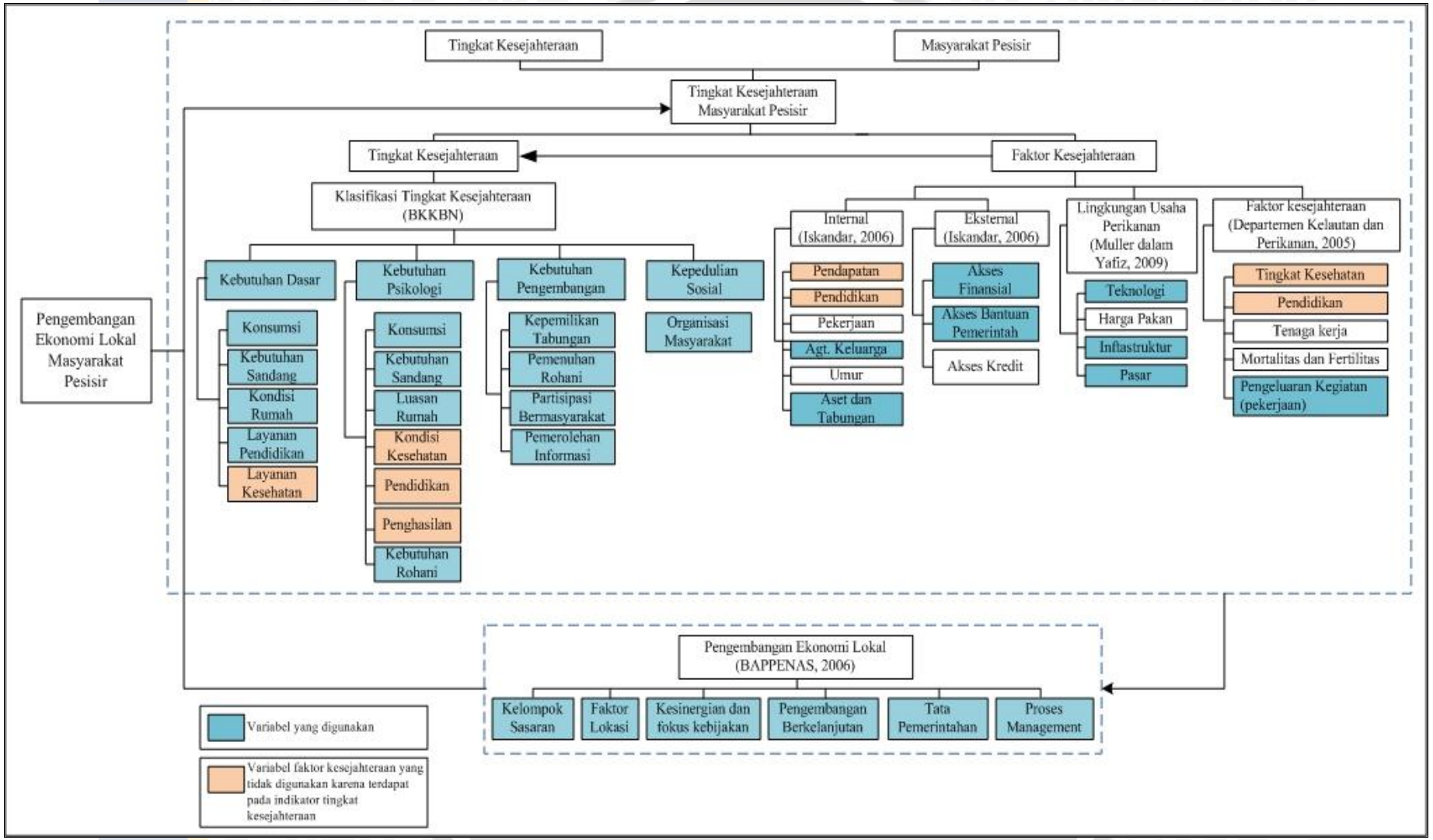

Gambar 2. 8 Kerangka Teori
Sumber: Penyusun, 2016

2.7 Kesimpulan Teori

Berdasarkan beberapa referensi terkait penelitian ini maka dapat disimpulkan veariabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah variabel untuk tingkat kesejahteraan, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan, pengembangan ekonomi lokal, serta keterkaitannya PEL dengan kesejahteraan masyarakat.

A. Tingkat Kesejahteraan **(Sub Bab 2.1 halaman 11)**

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penggunaan variabel tingkat kesejahteraan adalah indikator dari BKKBN yang diklasifikasikan menjadi lima tingkatan, diantaranya adalah: Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus.

B. Faktor Kesejahteraan **(Sub Sub Bab 2.2 halaman 15)**

Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan menggunakan teori dari Departemen Kelautan dan Perikanan, Iskandar, Muller dalam Yafiz M. Penggunaan variabel penelitian yang digunakan disesuaikan dengan wilayah penelitian yang berada pada kawasan pesisir. Variabel faktor kesejahteraan diantaranya adalah:

a. Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) yang merumuskan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan diantaranya tingkat kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, mortalitas dan fertilitas, perumahan dan konsumsi rumah tangga.
b. Iskandar (2006) yang mengklasifikasikan menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal.
c. Muller dalam Yafiz M (2009) yang menjelaskan tetnang faktor yang dapat memperbeaiki kesejahteraan nelayan diantaranya lingkungan usaha perikanan, lingkungan industri, kegiatan perikanan tangkap, kegiatan perikanan budidaya, kegiatan pengolahan hasil perikanan, kewenangan pemerintah pusat kewenangan pemerintah daerah, dan kesejahteraan nelayan

C. Pengembangan Ekonomi Lokal **(Sub Sub Bab 2.3 halaman 17)**

Pengembangan Ekonomi Lokal dalam penelitian ini menggunakan enam variabel dari BAPPENAS (2006) diantaranya adalah:

1. Kelompok Sasaran
2. Faktor Lokasi
3. Kesinergian dan Fokus Kebijakan
4. Pembangunan Berkelanjutan

5. Tata Pemerintahan
6. Proses Manajemen.

D. Keterkaitan PEL dalam Kesejahteraan

Keterkaitan antara PEL dengan kesejahteraan dapat dilihat melalui tujuan dan sasaran PEL yaitu untuk peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, serta menurunnya tingkat kemiskinan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Selain itu Faktor yang memepengaruhi pengembangan ekonomi lokal juga diantaranya adalah *basic needs, self esteem, ability to chooce,* dan *full employement* yang merupakan indikator dari kesejahteraan. Selanjutnya terdapat penelitian kaitannya pendekatan developmental dalam peningkatan kesejahteraan sosial berbasis kawasan.

Contents

2.1 Tingkat Kesejahteraan 11
2.1.1 Definisi Kawasan Pesisir 14
2.1.2 Masyarakat Pesisir 14
2.1.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir 15
2.2 Faktor Kesejahteraan 15
2.3 Pengembagan Ekonomi Lokal (PEL) 17
2.3.1 Definisi PEL 17
2.3.2 Tujuan dan sasaran PEL 20
2.3.3 Faktor Pengungkit 21
2.4 Faktor PEL dalam Kesejahteraan Masyarakat 22
2.5 Studi Terdahulu 23
2.6 Kerangka Teori 23
2.7 Kesimpulan Teori 27

Tabel 2. 1 Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga 11
Tabel 2. 2 Indikator Kebutuhan Psikologis 12
Tabel 2. 3 Indikator Kebutuhan Pengembangan 13
Tabel 2. 4 Indikator Aktualisasi Diri 14
Tabel 2. 5 Indikator faktor internal dari faktor kesejahteraan 16
Tabel 2. 6 Faktor internal dan eksternal lingkungan usaha perikanan 16
Tabel 2. 7 Faktor yang mempengaruhi PEL 22
Tabel 2. 8 Literatur yang digunakan 24

Gambar 2. 1 Diagram Heksagonal Pembangunan PEL 17
Gambar 2. 2 Keterkaitan pelaku dalam kelompok sasaran 18
Gambar 2. 3 Keterkaitan faktor lokasi 18
Gambar 2. 4 Keterkaitan kesinergian dan fokus kebijakan 19
Gambar 2. 5 Keterkaitan pembangunan berkelanjutan 19
Gambar 2. 6 Keterkaitan tata pemerintahan 20
Gambar 2. 7 Keterkaitan Proses Manajemen 20
Gambar 2. 8 Kerangka Teori 26